

EKOWISATA, SISTEM NAFKAH, DAN *DECOUPLING SUSTAINABILITY* DI WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

Ecotourism, livelihood System and Decoupling Sustainability in Wakatobi, Southeast Sulawesi

Kasmiati*), Arya Hadi Dharmawan, dan Deddy S.Bratakusumah

Program Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor

*) E-mail: kasmiati.10.s@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted in Wakatobi Southeast Sulawesi Province. Wakatobi overall administrative region is a national park established by decree of the Ministry Forestry No.7651/KPTS-II/2002 dated August 19 Wakatobi National 2002. Wakatobi National Park was the second largest marine park was owned by Indonesia and became one of the national tourism destination. It was the latest Indonesian biosphere reserves established by UNESCO in the 24th session of the ICC-MAB program in 2012, Paris. Wakatobi geostrategic position in the center of the world's coral led to an area that has a very rich biodiversity and have the beautifully and exotic underwater scenery. The superiority of location (geographical advantage) being the reason for local governments to establish ecotourism as a paradigm of Wakatobi regional development. This study examines the livelihood systems and the level of household resilience after ecotourism developed in Wakatobi through "Sustainable Livelihood Approach". In this study, it can be concluded that the development of ecotourism in the region has not given more contribution thus hamper the achievement of regional development based on ecotourism as nature conservation was maintained and well-being of local communities. However, the development of ecotourism still was inclusive so that people who are able to access such availability was top class household groups. Ecotourism basically can increase the economic resilience of households.

Keywords: regional development, ecotourism, livelihood, resilience, decoupling sustainability

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan wilayah administrasi Wakatobi merupakan taman nasional yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No.7651/KPTS-II/2002 tanggal 19 Agustus tahun 2002. Taman Nasional Wakatobi merupakan taman laut terbesar kedua yang dimiliki Indonesia dan menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata nasional. Merupakan cagar Biosfer terbaru Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO melalui sidang ke-24 ICC-MAB program pada tahun 2012 di Paris. Posisi Geostrategis Wakatobi di tengah pusat karang dunia, menyebabkan daerah ini sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan mempunyai pemandangan alam bawah laut yang indah dan eksotik. Keunggulan lokasi (*geographical advantage*) menjadi alasan Pemerintah Daerah menetapkan Ekowisata sebagai paradigma pembangunan wilayah Wakatobi. Penelitian ini bertujuan melihat sistem penghidupan dan tingkat resiliensi rumah tangga setelah ekowisata dikembangkan di Wakatobi menggunakan pendekatan "*Sustainable Livelihood approach*". Hasil kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan ekowisata belum berkontribusi besar dalam pembangunan wilayah karena terjadi persoalan "Decoupling Sustainability", hal ini menghambat tercapainya tujuan pembangunan wilayah yang berbasis ekowisata yaitu kelestarian alam terjaga dan masyarakat lokal memperoleh manfaat. Tetapi yang terjadi adalah pembangunan ekowisata yang belum inklusif sehingga hanya lapisan rumah tangga atas yang mampu mengakses peluang yang tersedia. Ekowisata pada dasarnya dapat meningkatkan resiliensi ekonomi rumah tangga.

Kata kunci: pembangunan wilayah, ekowisata, livelihood, resiliensi, decoupling sustainability

PENDAHULUAN

Selama ini wilayah dibangun melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole theory*). Wilayah yang telah mengalami kemajuan diharapkan mampu memberi tetesan ke bawah bagi daerah sekitarnya (*trickle down effect*), agar pembangunan yang merata dapat tercapai. Kenyataannya hingga saat ini ketimpangan masih tetap lebar, bahkan gini rasio Indonesia cenderung meningkat yaitu 0.35 pada tahun 2008 menjadi 0.413 pada tahun 2013. Perekonomian Indonesia dari segi pertumbuhan sangat menakutkan hingga *World Development Indicators Database* menempatkan Indonesia pada peringkat ke 16 dunia dari 192 negara dengan total *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar 868,346 juta US dolar¹. Namun kemajuan di bidang ekonomi tidak selaras dengan

kemajuan kehidupan sosial yang tercermin pada nilai indeks gini. Selain itu kondisi ekologi Indonesia yang tergambar dalam nilai *Environmental Performance Indeks* (EPI) 2014 masih buruk, menempati urutan ke 112 dari 178 negara. Fakta ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang dilakukan selama ini masih bersifat konservatif, hanya berorientasi pada pertumbuhan, mengejar nilai GDP yang tinggi namun mengabaikan kondisi lingkungan, sehingga terdapat *gap* yang besar antara kemajuan perekonomian dan kondisi lingkungan.

Model pembangunan perlu direkonstruksi, karena sejauh ini telah menunjukkan kegagalan konsep *trickle down effect* tidak kunjung terjadi². Dibutuhkan sebuah model pembangunan yang memiliki daya ungkit (*nudge*) memajukan perekonomian

1. Sumber World Bank 2014

2. Lihat Orasi Ilmiah Guru Besar IPB Tahun 2013 oleh : Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, Msi dengan judul —ketimpangan Pembangunan antar wilayah di Indonesia : Fakta dan Strategi Inisiatif—

namun tidak mereduksi lingkungan atau nilai-nilai sosial budaya yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat. Memanfaatkan elemen endogen³ sebagai stimulus pembangunan perlu dilakukan agar setiap wilayah mengalami kemajuan dengan bergantung pada potensi lokal. Salah satu elemen endogen yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi dan pemerataan pembangunan adalah memanfaatkan kondisi wilayah Indonesia yang bersifat heterogen. Ekowisata salah satu pendekatan pembangunan wilayah yang memanfaatkan elemen endogen terutama di kawasan Taman Nasional (TN). Daruhi dan Nugroho (2012)⁴ menyatakan bahwa kelembagaan ekowisata di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengembangan kawasan konservasi (*protected area*), khususnya wilayah TN yang menyebar hampir di seluruh wilayah nusantara. TN Wakatobi salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) nasional. Merupakan cagar Biosfer terbaru Indonesia yang ditetapkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) melalui sidang ke-24 *International Coordinating Council (ICC) of the Man and the Biosphere* (MAB) program pada tahun 2012 di Paris.

Pengembangan kegiatan ekowisata di Wakatobi diharapkan menstimulus perekonomian wilayah dan kehidupan masyarakat lokal karena permintaan akhir sektor wisata akan berdampak pada sektor lain baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata lain terjadi *efek multiplier*. *World Travel and Tourism Center* (WTTC 2014) menyatakan bahwa perjalanan dan wisata memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian. Sementara itu Wardhani (2007) menyatakan pengembangan ekowisata dapat menumbuhkan penyediaan kesempatan kerja, serta tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selama tahun 2005-2010 sektor pariwisata Wakatobi menempatkan diri di posisi terbesar kedua setelah perikanan dan kelautan. Akan tetapi manfaat dari perkembangan pariwisata bagi perekonomian lokal dan masyarakat masih perlu ditingkatkan⁵. Aktivitas wisata yang tidak dirancang untuk melibatkan komunitas lokal menjadi salah satu jalan masuknya modal (kapitalisasi) yang berpotensi mengalienasi masyarakat lokal dari sumber pendapatannya, seperti yang telah diungkapkan oleh Iqbal (2004) bahwa penetrasi kapitalisme, modal tinggi semakin menempatkan nelayan kecil tradisional ke dalam posisi yang lemah. Disisi lain sumber pendapatan yang sepenuhnya bergantung pada aktifitas wisata berpotensi memiliki derajat ketidakamanan sumber nafkah (*degree livelihood insecurity*) yang tinggi karena aktifitas wisata tidak hanya bergantung pada daerah tujuan wisata tetapi sangat sensitif terhadap *trends* dan *shocks*.

Kegiatan wisata memiliki dua sisi bagi kehidupan masyarakat, sebagai peluang ekonomi bagi yang dapat mengakses atau merekayasa sumberdaya untuk terlibat dalam kegiatan wisata, sementara yang tidak mampu mengakses sumber daya atau memanfaatkan peluang akan tetap pada sumber-sumber nafkah lama. Oleh sebab itu meskipun peluang berusaha terbuka karena hadirnya aktivitas wisata namun tidak semua kelompok masyarakat akan mudah melakukan penyesuaian atau proses adaptasi terlebih yang memiliki akses terbatas. Kondisi ini kemudian menarik untuk dikaji mengenai perubahan pola nafkah masyarakat setelah ekowisata menjadi pendekatan pembangunan di TN Wakatobi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat struktur nafkah masyarakat apakah menjadi lebih baik sebagai akibat perkembangan kegiatan ekowisata dan apakah sumber nafkah dari ekowisata mampu meningkatkan resiliensi ekonomi rumah tangga masyarakat lokal. Disini lah titik pijak mengapa topik penelitian ini penting untuk memberikan gambaran awal mengenai seberapa kuat

3. Elemen endogen adalah elemen yang tumbuh dan berkembang di dalam wilayah sendiri, seperti sumberdaya lokal, entrepreneurship lokal dan kemampuan pengambilan keputusan lokal, aktor sosial yang mampu mengendalikan proses pengembangan, dan mendukung proses selama fase transformasi

4. Jumlah Taman nasional di Indonesia sebanyak 50, menyebar di Berbagai Provinsi dan terdiri atas beberapa jenis ekosistem seperti Hutan tropika, rawa, laut, pesisir, rawa gambut, air tawar, savana, pantai, dan danau

daya tahan rumahtangga di Kabupaten Wakatobi dalam menghadapi perubahan kondisi sosial-ekologis. Pengetahuan mengenai penghidupan rumahtangga suatu masyarakat serta tingkat kelentingan mereka akan memberikan suatu pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai cara baca dalam memahami kondisi masyarakat Wakatobi hari ini yang ruang hidup tengah berada dalam proses bekerjanya modal dari luar wilayah Wakatobi dalam bentuk perluasan aktifitas ekowisata.

METODE PENELITIAN

Model analisis yang digunakan adalah *sustainable livelihood framework* (SLF) untuk memahami keterkaitan antarkegiatan ekowisata dan sistem penghidupan rumahtangga. Perspektif nafkah dipilih sebagai alat bantu mengkaji keterkaitan antara ekowisata dan pengembangan wilayah di Wakatobi untuk meneruskan tradisi penelitian mazhab Bogor yang menurut Dharmawan (2007) bahwa landasan pemikiran kajian nafkah didasari atas keperihatinan akan hilangnya hak-hak hidup individu dan masyarakat oleh karena hampasan sistem ekonomi kapitalisme global dan kehancuran sumberdaya alam serta lingkungan hidup akibat modernitas akhir (*late modernity*). Tingkat resiliensi rumah tangga diukur berdasarkan penilaian atas ketahanan sumber penghidupan (*assessing livelihood resilience*) diadopsi dari Sprezza *et al* (2014). Mengukur resiliensi *livelihood* dari tiga variabel utama yaitu *buffer capacity*, *self-organization*, dan *capacity for learning*. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian (Creswell 2009), sehingga metode yang digunakan dapat disebut sebagai penelitian campuran (*mix method*).

Unit Analisis dan Kualifikasi Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumahtangga (*household*). Rumahtangga merupakan sebuah unit sosial yang didefinisikan berbagi tempat tinggal yang sama atau tungku yang sama (Ellis 1998). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Juanda (2009) data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka hasil pengukuran atau penghitungan (*Counting*). Pengumpulan data menggunakan teknik survey melalui kuisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Selain itu dilaksanakan observasi yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat, objek dan atraksi kegiatan wisata di lokasi penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, terpilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik wilayahnya yang unik. Merupakan daerah administrasi tingkat dua (Kabupaten) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh wilayahnya merupakan taman nasional yang dikelola berdasarkan sistem zonasi. Kabupaten Wakatobi terbentuk dari penggabungan beberapa pulau-pulau kecil, sehingga desa-desa yang berada di Kabupaten Wakatobi 90 % termasuk dalam kategori desa pesisir.

Fokus analisis di tingkat mikro terdiri dari dua kelompok masyarakat terpilih untuk melihat bagaimana pengaruh ekowisata terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Kelompok pertama penelitian ini adalah rumah tangga yang mendiami Pulau Kapota. Wilayah ini dipilih menjadi salah satu lokasi penelitian karena merupakan suatu pulau kecil yang berpenghuni, terdapat banyak objek wisata dan sangat dekat dari pusat kota hanya di tempuh sekitar \pm 30 menit menggunakan transportasi laut reguler. Pulau Kapota merupakan bagian dari kecamatan Wangi-wangi Selatan, terdiri atas lima desa yaitu Desa Pulau Kapota, Pulau Kapota Utara, Kabita Togo, Kabita,

dan Desa Wisata Kolo. Kelompok kedua adalah rumahtangga Bajo Mola Raya merupakan satu kesatuan (komunitas) mereka mendiami satu wilayah yang sama dimana pergaulan dan cara hidup sehari-hari tidak berdasarkan pada batasan administrasi. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Pulau Kapota dan di Bajo Mola Raya yang secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL PENELITIAN

Ekowisata dan Struktur Nafkah Rumahtangga

Dalam menjalani hidup sehari-hari, rumahtangga menerapkan tindakan-tindakan rasional untuk bertahan hidup. Berbagai macam tindakan yang memanfaatkan sumberdaya (asset dan akses) untuk meneruskan kelangsungan hidup rumahtangga merupakan strategi penghidupan. Sebuah tindakan bisa disebut strategi mata pencaharian ketika tindakan tersebut tujuan utamanya berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan eksistensi, (Dharmawan2001). Strategi penghidupan pedesaan seringkali sangat bergantung pada sumber daya alam (Scoones 1998). Maka paradigma pembangunan di wilayah wakatobi yang mendorong peningkatan sektor jasa melalui pengembangan ekowisata yang mengutamakan sektor jasa secara teoritis akan mempengaruhi struktur nafkah rumahtangga.

Struktur nafkah merupakan suatu gambaran pendapatan rumahtangga yang diperoleh dari hasil pertanian, pariwisata, serta pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pariwisata maupun pertanian. Gambar di bawah menunjukkan struktur nafkah rumahtangga masyarakat Pulau Kapota dan Bajo Mola.

Sistem Penghidupan Rumahtangga Pulau Kapota

Struktur nafkah rumahtangga di Pulau Kapota dan Bajo Mola memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada kontribusi sektor pariwisata yang menempati posisi terendah dibandingkan dengan kedua sektor lainnya. Perbedaannya terletak pada besaran pendapatan antara masyarakat Bajo Moladan Pulau Kapota. Gambar di atas secara jelas menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Bajo Mola lebih tinggi dari pendapatan masyarakat Pulau Kapota. Hal ini karena sumber pendapatan tertinggi yang membentuk struktur nafkah rumahtangga Pulau Kapota berasal dari sektor non pertanian dan non pariwisata, karena beberapa rumahtangga yang memiliki pekerjaan dari sektor ini merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai pendapatan yang cukup bahkan jauh lebih tinggi daripada pendapatan petani atau nelayan yang ada di Pulau Kapota. Selain gaji pegawai, *remittance* berkontribusi besar dalam membentuk struktur nafkah. Terdapat beberapa anggota rumahtangga yang melakukan migrasi dan rutin mengirimkan uang belanja (*transper payment*) kepada keluarga yang berada di Pulau Kapota sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan dari sektor non pertanian dan non pariwisata.

Sektor kedua yang menempati struktur nafkah rumahtangga di Pulau Kapota adalah pertanian. Setiap rumahtangga yang berada di Pulau Kapota pada dasarnya melakukan pekerjaan yang terkait dengan sektor pertanian namun pendapatan dalam bentuk uang memang masih sangat rendah, hal ini karena cara masyarakat bertani yang masih bersifat subsistem (*peasantry*), mengerjakan lahan yang sangat

sempit bahkan hanya bercocok tanam di pekarangan rumah. Aktivitas bertani belum ditujukan untuk komersialisasi atau melakukan kapitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga, namun lebih ditujukan untuk bertahan hidup (*survival strategy*). Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang paling kecil dalam membentuk

struktur nafkah rumahtangga masyarakat Pulau Kapota

Sistem Penghidupan Rumahtangga Bajo Mola

Peranan ekowisata dalam membentuk struktur nafkah rumahtangga Bajo Mola sama dengan kondisi di Pulau Kapota, sektor pariwisata menempati posisi terendah. Besaran jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata jauh lebih rendah dari kedua sektor lainnya. Kontribusi sektor pariwisata yang rendah karena aktivitas wisata yang selama ini berlangsung di Bajo Mola belum memiliki kelembagaan formal maupun non formal yang mengatur aktivitas wisata. Ketika penelitian ini dilaksanakan kesadaran masyarakat akan potensi dan manfaat ekowisata bagi ekonomi rumahtangga dan keberlangsungan lingkungan hidup masih dalam proses pembentukan. Sektor non pertanian dan non pariwisata menempati urutan kedua dalam membentuk struktur nafkah rumahtangga Bajo Mola. Struktur nafkah yang mendominasi adalah sektor pertanian. Pendapatan dari sektor ini berasal dari kegiatan pertanian dalam arti luas terutama sektor perikanan karena secara umum masyarakat Bajo Mola merupakan nelayan dan tidak bercocok tanam seperti masyarakat Pulau Kapota.

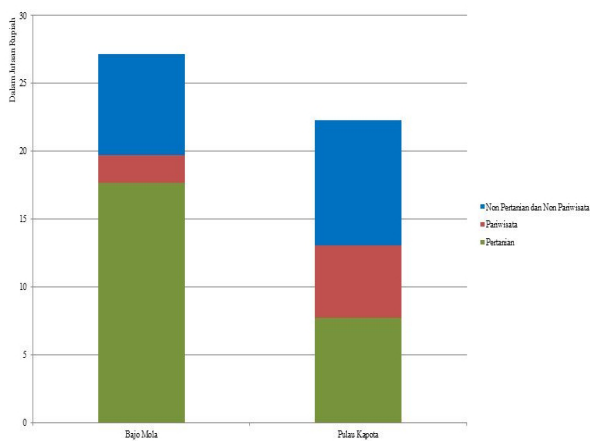
Masyarakat Bajo dalam sejarah panjangnya merupakan orang yang hidup nomaden di lautan (*sea nomads*) namun kemudian menetap dan tinggal di wilayah pesisir. Setelah mengalami proses berinteraksi dengan masyarakat daratan maka terjadi perubahan tatanan hidup yang mempengaruhi perekonomian rumahtangga Bajo Mola. Hasil penelitian Wianti (2011) menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Bajo Mola, karena perkembangan masyarakat dan penetrasi kapitalisme dari orang-orang Mandati dan gempuran kapitalisme global memunculkan pemikiran-pemikiran rasionalitas terhadap ekonomi dan uang, dan pada akhirnya menciptakan orang-orang Bajo Mola yang berjiwa wirausaha dan yang pandai mengelola keuangan. Tidak mengherankan lagi jika rumahtangga Bajo Mola saat ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang spekulatif-kapitalis seperti yang dilakukan oleh orang-orang daratan. Kini, masyarakat Bajo Mola dapat membangun hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam hal jual beli hasil laut.

Struktur Nafkah dan Pelapisan Rumahtangga

Pelapisan rumahtangga Bajo Mola dan Pulau Kapota dilakukan untuk memahami bagaimana sektor pariwisata berkontribusi dalam setiap lapisan rumahtangga, apakah sama atau berbeda-beda. Struktur nafkah rumahtangga berdasarkan lapisan rumahtangga secara keseluruhan memperlihatkan kontribusi sektor pariwisata yang belum signifikan di setiap lapisan rumahtangga dan terjadi di kedua lokasi penelitian.

Secara umum gambar di atas menunjukkan bahwa kehadiran kegiatan wisata hanya diakses oleh rumahtangga lapisan menengah dan atas sementara golongan bawah masih tetap pada sumber pendapatan yang lama dan memperoleh sangat sedikit manfaat dari kegiatan wisata. Hasil penelitian ini berkebalikan dari penelitian Januarty (2012) yang meneliti struktur dan strategi nafkah rumahtangga di kawasan wisata alam gunung Salak Endah Bogor menemukan bahwa pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan di seluruh tingkatan lapisan rumahtangga, sebaliknya sektor pertanian berkontribusi sangat kecil dan masyarakat telah menganggapnya sebagai sektor yang sudah tidak terlalu penting untuk mendukung perekonomian rumahtangga.

Farm exit seperti yang dijelaskan dalam Bhandari(2013) bahwa ada kecenderungan terjadinya peralihan mata pencaharian dari pertanian ke non pertanian belum terjadi di Wakatobi. Kegiatan ekowisata belum berkontribusi secara signifikan dalam membentuk struktur nafkah rumahtangga di semua lapisan. Kondisi seperti ini memiliki sisi baik mengingat perputaran ekonomi dalam kegiatan wisata sangat bergantung



Gambar 2. Struktur Pendapatan Rumahtangga Pulau Kapota dan Bajo Mola, Tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi

pada wisatawan yang sulit dikontrol dan dipengaruhi oleh banyak variabel dan kehadiran kegiatan wisata pada dasarnya memang bukan ditujukan untuk merubah mata pencaharian rumahtangga, tetapi memberikan ruang dan peluang baru untuk memperoleh pendapatan tambahan. Tao dan Wall (2009) bahwa pariwisata sangat penting melengkapi sumber mata pencaharian bukan menggantikan yang telah ada untuk mengarah kepada diversifikasi strategi penghidupan. Oleh sebab itu persoalan mendasar yang terjadi di Wakatobi adalah akses terhadap perbaikan dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata yang tidak merata di seluruh lapisan rumahtangga kondisi ini yang harus diperbaiki, harus ada mekanisme untuk mendorong akses yang merata dari seluruh lapisan rumahtangga. Selain itu harus ada sebuah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan pendapatan perkapita di seluruh sektor pada setiap lapisan rumahtangga.

Tingkat Kemiskinan Rumahtangga

Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan bagian penting dalam model SLF mengingat, penghidupan berkelanjutan (*Sustainable livelihood*) merupakan upaya untuk memperluas definisi konvensional dan pendekatan untuk pengukuran kemiskinan (Lambini dan Nguyen 2014) dan tujuan akhir dari proses pembangunan adalah kesejahteraan (*well-being*). Cara paling sederhana untuk mengetahui apakah rumahtangga telah sejahtera atau belum setidaknya telah keluar dari garis kemiskinan. Salah satu indikator yang dapat digunakan berdasarkan bank dunia (*World Bank*) yang mengukur kemiskinan melalui pendapatan perkapita yaitu USD 2 \$ atau setara dengan Rp.27.000,00⁵ perhari. Ini berarti setiap orang dalam suatu rumahtangga harus memiliki pendapatan sama dengan lebih dari Rp.27.000,00 perhari jika kurang dari ini maka masih termasuk dalam kategori miskin.

Secara umum rata-rata pendapatan perkapita rumahtangga berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ekonomi rumahtangga yang cukup baik hanya dimiliki oleh lapisan atas, sementara jumlah rumah tangga rumahtangga dalam lapisan ini adalah yang paling sedikit dibandingkan lapisan menengah dan bawah. Ketimpangan terjadi karena rumahtangga lapisan bawah tidak mampu mengakses atau memanfaatkan peluang ekonomi akibat ekowisata yang berkembang karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki terutama finansial dan kompetensi mengingat komoditas utama dalam aktivitas ekowisata adalah jasa yang membutuhkan keterampilan atau modal untuk terlibat dalam pasar.

Lapisan bawah pada akhirnya hanya mempertahankan kehidupan (*survival strategy*). Pengembangan ekowisata menstimulus lapisan rumahtangga atas untuk melakukan konsolidasi atau meningkatkan derajat sosial ekonomi (*consolidatin oracumulation strategy*). Rumahtangga menengah atas dapat mengusahakan

5. Nilai Kurs 1\$ USD sama dengan Rp.13.500, 00 rata-rata tahun 2015

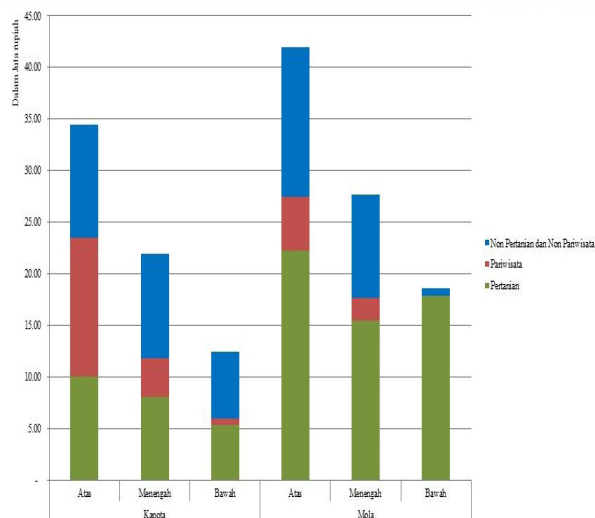
modal untuk membuka atau memperluas usaha, sebab kelimpahan modal (*available resources*) yang dimiliki oleh masing-masing rumahtangga akan menentukan strategi nafkah yang dipilih ke depan (Mardiyaningsih 2003).

Perkembangan aktifitas ekowisata secara umum belum mampu menarik keluar rumahtangga dari lingkaran kemiskinan. Ekowisata belum berkontribusi signifikan karena untuk melakukan peralihan kerja dari sektor pertanian ke sektor pariwisata membutuhkan akses atau modal yang dapat mendukung usaha dan mayoritas rumahtangga tidak mempunyai kedua hal tersebut dalam jumlah yang cukup memadai, maka rumahtangga tentu lebih memilih strategi aman lebih dulu (*safety First Politics*) daripada mengambil resiko seperti yang diungkapkan dalam (Scott 1981).

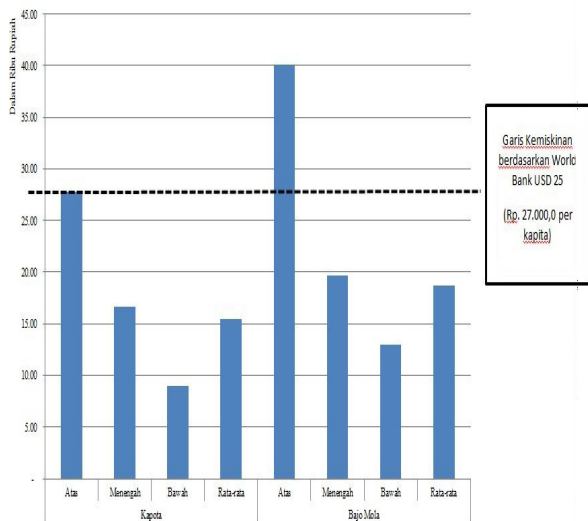
Assesment Livelihood Resiliensi

Chambers dan Conway (1991) menyatakan bahwa untuk memahami keberlanjutan mata pencaharian membutuhkan penilaian tentang masa depan yang semakin tidak terduga. Maka, perspektif resiliensi semakin banyak digunakan sebagai pendekatan untuk memahami dinamika sistem sosial-ekologi (Folke 2006). Resiliensi merupakan daya lenting atau kemampuan rumahtangga untuk bertahan, melewati dan pulih dari krisis yang terjadi. Jika merujuk pada Berkeset *et.al.* (2003) resiliensi dianggap sebagai sifat yang muncul dari sistem, yang

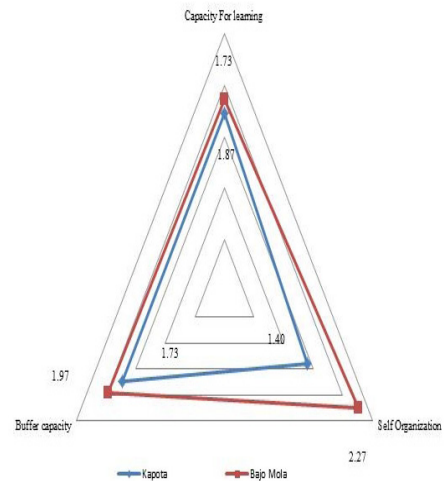
Tidak dapat diprediksi atau dipahami hanya dengan memeriksa bagian sistem. Ketahanan menyerap perubahan dan memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Konsep resiliensi kemudian menjadi bagian penting dalam pengukuran sistem penghidupan untuk memahami dan memprediksi lebih jauh kemampuan rumahtangga menyesuaikan diri atas perubahan kondisi social ekonomi dan ekologi terutama di wilayah pesisir yang beriklim tropis. Karena di daerah tropis, masyarakat dan ekosistem pesisir akan menghadapi resiko dari fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, dan badai, dengan implikasi serius bagi keamanan dan peluangnya dalam mencari nafkah (*livelihood opportunities*), (Foster et al 2013). Oleh karena itu, penting bahwa setiap proses pembangunan yang benar-benar berkelanjutan memperhitungkan penuh keniscayaan dampak negative terhadap lingkungan dan menjamin perlindungan yang memadai bagi mereka yang rentan terhadap risiko lingkungan dan bahaya (Kelly et al 2001).



Gambar 3. Struktur Pendapatan Rumahtangga Bajomola dan Pulau Kapota Berdasarkan Sumber Lapisan Rumahtangga, Tahun 2015 di Kabupaten Wakatobi



Gambar 4. Pendapatan Perkapita Pertama Berdasarkan Lapisan, di Pulau Kapota dan Bajomola, Tahun 2015



Gambar 5. Segitiga Nilai Buffer Capacity, Self Organization dan Capacity for Learning Rumahtangga Pulau Kapota dan Bajomola, Tahun 2015

Nilai *livelihood* resiliensi merupakan taksiran kemampuan rumahtangga untuk kembali dalam kondisi stabil (*equilibrium condition*) ketika terjadi krisis. Berikut nilai variable pembentuk kelentingan nafkah rumahtangga. Komponen utama yang membentuk *livelihood* resiliensi rumahtangga tidak tinggi. Oleh sebab itu peranan seluruh stakeholder terutama pemerintah dan lembaga yang mendampingi aktivitas ekowisata perlu mendorong peningkatan nilai variabel pembentuk resiliensi nafkah rumahtangga terutama *capacity for learning* dan *self organization*. Kedua komponen ini memerlukan kerja sosial dan kebersamaan untuk meningkatkan kualitasnya. Meskipun Wilson (2013) menyatakan bahwa:

“Building strong community resilience is often an endogenous process linked to local customs that, at times, may operate, change and influence decision-making outside of the state policy realm, although community-level actors cannot always be left alone to guide their own resilience pathways without interference from the state”

Pernyataan Wilson di atas tegas menyatakan bahwa negara harus hadir dalam membangun tingkat resiliensi masyarakat. Meskipun masyarakat telah memiliki sumberdaya yang bersifat endogen dan mampu berjalan menuju arah penguatan komunitas tetapi tidak boleh dibiarkan sendiri, harus ada mekanisme, kebijakan dan perlakuan dari negara dalam hal ini kebijakan pemerintah sebagai sebuah kewajiban melindungi, menuntun masyarakat dalam kondisi stabil dan siaga pada waktu-waktu biasa dan memulihkan kemampuan masyarakat ketika terjadi krisis. Ellisdan Freeman (2005) mengungkapkan bahwa kesempatan rumahtangga di perdesaan dalam membangun jalur mereka sendiri keluar dari kemiskinan sangat tergantung pada lingkungan kelembagaan, termasuk perilaku sektor publik, cara pasar bekerja, dan norma-norma sosial, budaya dan harapan.

Pelapisan dan Resiliensi Rumahtangga

Resiliensi lapisan rumahtangga diperoleh berdasarkan formula berikut ini:

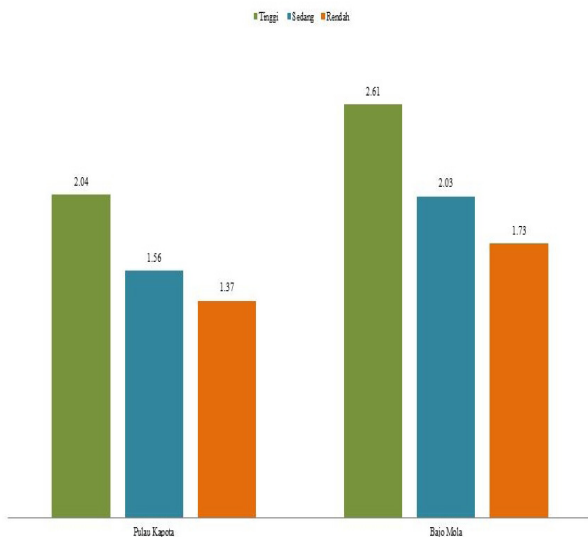
$$LRi = (\sum CL, BC, SO) / 3$$

Keterangan formula diatas adalah ALR adalah *livelihood resilience index*. CL merupakan nilai dari *capacity for learning*, BC nilai dari *buffer capacity* dan SO adalah nilai dari *self organization*

yang kemudian dibagi dengan jumlah rumahtangga di setiap lapisan. Pengukuran resiliensi rumahtangga berdasarkan lapisan dilakukan karena ekowisata semakin dianggap oleh masyarakat adat dan lokal sebagai alat penting untuk mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan konservasi keanekaragaman hayati Honey (2006) dalam Blangy & Mehta (2006), hal ini berarti bahwa sistem nafkah dan kegiatan ekowisata terkait dengan tingkat resiliensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumahtangga atas yang mempunyai keterlibatan lebih besar dengan aktivitas wisata mempunyai tingkat resiliensi yang lebih tinggi daripada lapisan rumahtangga lain, artinya ekowisata berkontribusi dalam pembentukan tingkat resiliensi nafkah rumahtangga. Selanjutnya adalah rumahtangga yang berada pada lapisan menengah, dan yang paling rendah tingkat resiliensinya adalah mereka yang berada pada lapisan bawah. Gambar berikut menunjukkan tingkat resiliensi berdasarkan lapisan rumahtangga.

Lapisan atas sebagai rumahtangga paling resilien karena lapisan atas memperoleh tambahan pendapatan dan melakukan rekayasa nafkah yang terkait dengan aktivitas ekowisata. Rendahnya tingkat resiliensi rumahtangga lapisan bawah menunjukkan bahwa mereka jauh lebih rentan daripada lapisan rumahtangga lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekowisata belum berhasil menjadi model pembangunan yang inklusif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif, mengakses dan memperoleh manfaat dari pengelolaan kegiatan ekowisata di TN Wakatobi.

Angka resiliensi nafkah rumahtangga meningkat sesuai dengan meningkatnya lapisan pendapatan rumahtangga karena lapisan atas dapat melakukan konsolidasi atau akumulasi modal dengan memanfaatkan peluang yang hadir akibat pengembangan ekowisata. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Nyaupane dan Poudel (2011) yang menyimpulkan bahwa ketika mata pencaharian masyarakat meningkat, mereka dapat berinvestasi lebih banyak dalam industri pariwisata dan melakukan kontrol yang lebih besar. Hal ini membantu mengurangi kebocoran dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun peningkatan dan perluasan mata pencaharian masyarakat Bajo Mola dan Pulau Kapota hanya terjadi pada lapisan atas sehingga lapisan menengah bawah yang tidak memperoleh peningkatan pendapatan tidak mengalami perubahan aset atau kemudahan dalam akses atas sumberdaya sehingga tingkat resiliensinya tidak berubah, maka jarak timpang antara golongan atas dan bawah semakin lebar atau menuju divergensi tingkat resiliensi.



Gambar 6. Nilai Livelihood Resiliensi Index Berdasarkan Lapisan Rumahtangga di Pulau Kapota dan Bajo Mola, Tahun 2015

“Decoupling Sustainability” dalam Pembangunan Wilayah Berbasis Ekowisata

Dalam Song & Liu (2014) definisi *soecoupling* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD2006)* adalah untuk mematahkan hubungan antara “*economic goods*” dan “*environmental bads*”. Selanjutnya program (UNEP2011) mengklasifikasikan *decoupling* untuk pembangunan berkelanjutan kedalam dua kategori utama: *resource decoupling* (contohnya adalah menurunkan tingkat penggunaan sumberdaya dalam setiap unit aktifitas ekonomi) dan *impactdecoupling* (contohnya adalah menurunkan dampak negatif terhadap lingkungan atas penggunaan setiap unit sumberdaya). Penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan *decoupling* berdasarkan definisi UNEP pada dasarnya terjadi dimana aktifitas ekowisata dapat mengurangi penggunaan sumberdaya dan dampak penggunaan sumberdaya terhadap lingkungan.

Namun kegiatan ekowisata yang dikenal sebagai bagian dari gagasan pembangunan berkelanjutan menciptakan satu bentuk *decoupling* yang lain (*decoupling in decoupling*) dalam hal ini keberimbangan antara lingkungan dan ekonomi dapat tercapai namun melahirkan persoalan lain yaitu ketimpangan dalam konteks sosial dan ekonomi –*decoupling economy*– pertumbuhan dan pemerataan tidak linear sehingga keberlanjutan gagal, maka terjadilah –*decoupling sustainability*–. Ketika lingkungan Wakatobi diproteksi dalam hal ini dikonservasi, dan dikelola melalui gagasan pembangunan berkelanjutan (ekowisata) malah menghasilkan masalah lain yaitu terbelahnya masyarakat kedalam dua kategori yaitu mereka yang mampu mengakses dan memanfaatkan perubahan yang terjadi dan mereka yang tidak berdaya atas perubahan pemanfaatan alam sehingga berpotensi semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan. Inilah kemudian yang peneliti maksudkan sebagai “*decoupling*” akses sebagian masyarakat “patah” ditengah konsep pembangunan yang diharapkan berjalan selaras antara lingkungan dan ekonomi. Ekowisata sebagai bentuk pemanfaatan jasa lingkungan “*environmental service economy*” diharapkan mampu menjadi daya ungkit (*nudge*) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa melalui proses eksploitasi alam tidak terjadi. Sehingga, pembangunan ekonomi wilayah yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan (*growth, equity, and sustainability*) tidak tercapai. Maka, pariwisata tidak harus dianggap sebagai obat mujarab (*panacea*) untuk semua masalah dalam masyarakat lokal (Tao dan Wall 2009).

Berdasarkan struktur pendapatan rumahtangga, ternyata lapisan ekonomi bawah tidak dapat mengakses benefit yang tersedia, sekaligus ekowisata tidak bisa menjadi sumber kelentingan nafkah mereka (golongan bawah). Fakta ini membahayakan usaha konservasi sumberdaya alam TN Wakatobi, karena apabila nafkah rumahtangga lapisan bawah rentan, maka setiap saat mereka dapat mengancam keberadaan TN Wakatobi –*encroachment and illegal Fishing for livelihoods*– sangat mungkin terjadi. Efek jangka panjang dari lingkungan dan kerawanan sosial dan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati harus dilihat sebagai kontinjensi negatif sebagai dampak dari apa yang dilakukan hari ini (Ekblom 2012).

Pelibatan masyarakat secara merata harus didorong sebelum ketimpangan menjadi semakin lebar antara lapisan rumahtangga. Ekowisata yang tidak dikelola dengan baik maka hanya akan menjadi alat untuk mengakumulasi modal investor, menguntungkan sebagian kecil masyarakat dan ekowisata hanya menjadi label (*brand*) untuk menarik wisatawan. Artinya ekowisata tidak menjadi model pembangunan yang bersifat inklusif jika *decoupling sustainability* terus berlangsung, sebaliknya yang terjadi adalah pengelolaan ekonomi berdasarkan —institusi ekonomi ekstraktif yaitu lembaga perekonomian yang dirancang untuk memeras, menyadap, mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat untuk memperkaya lapisan lainnya, (Acemoglu dan Robinson 2015).

Kondisi yang terjadi di Wakatobi saat ini menyebabkan kegiatan wisata tidak berbeda dengan sektor-sektor lain yang memberikan ruang sebesar-besarnya kepada investor sementara masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat sebagaimana seharusnya. Che (2006) telah berpikir bahwa ekowisata barangkali dapat diharapkan sebagai solusi teknokratis untuk keterbelakangan yang tidak pernah membahas kesenjangan struktural yang mendorong ketergantungan ekonomi dan ketidakstabilan dan akibatnya mangancam ekosistem (ketika ada aliran modal, wisatawan, dan lain-lain). Tentu ekowisata dapat menjadi solusi teknokratis dalam membangun wilayah berkelanjutan jika *decoupling sustainability* diatasi. Jika tidak maka secara keseluruhan aktivitas wisata akan sama dengan ungkapan para kritikus seperti yang terangkum dalam Damanik (2013) bahwa pariwisata dinilai sebagai mesin pencerabut akar kesejahteraan masyarakat lokal karena sering memarginalkan peran dan akses mereka dari pusran aktivitas ekonomi yang diinduksi industri pariwisata itu sendiri. Oleh sebab itu aktifitas ekowisata tidak boleh menjadi sekedar —komodifikasi alam tapi harus mengkonservasi, merestorasi keadaan yang semakin buruk serta mendukung keberlangsungan hidup masyarakat lokal dalam seluruh lapisan rumahtangga. Tidak boleh hanya menguntungkan lapisan atas, dan para pemodal. Ekowisata harus didorong menjadi sebuah model pembangunan mampu meretas ketimpangan yang semakin lebar sekaligus meredam pengrusakan atas alam yang semakin massif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan struktur nafkah masyarakat tidak menjadi lebih baik karena adanya pengembangan kegiatan ekowisata. Sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama. Selain itu tingkat pendapatan perkapita masyarakat diseluruh lapisan rumahtangga masih rendah, terutama pendapatan lapisan menengah bawah masih sangat jauh dari garis kemiskinan. Kegiatan ekowisata yang berlangsung di Bajo Mola dan Pulau Kota belum dapat meningkatkan kesejahteraan rumahtangga.

Aktifitas ekowisata dapat meningkatkan resiliensi ekonomi rumahtangga. Hal ini terlihat dari lapisan rumahtangga atas memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan menengah dan bawah. Lapisan atas memperoleh

ambahan pendapatan dan melakukan rekayasa nafkah yang terkait dengan aktifitas ekowisata dibandingkan kedua lapisan rumah tangga lainnya sehingga menjadi lebih resilien. Pengelolaan ekowisata yang lebih baik dan mampu melibatkan seluruh lapisan rumah tangga berpotensi meningkatkan resiliensi ekonomi dan lingkungan. Kegiatan ekowisata belum berkontribusi signifikan dalam pembangunan wilayah karena terjadi persoalan *Decoupling Sustainability* yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan wilayah yang berbasis ekowisata yaitu kelestarian alam terjaga dan masyarakat lokal memperoleh manfaat. Sekaligus, *decoupling sustainability* diajukan sebagai tesis dari tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu D dan Robinson AJ. 2015. *Mengapa Negara Gagal Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*. Jakarta (ID): Gramedia
- Bhandari PB. 2013. *Rural livelihood change? Household capital, community resources and livelihood transition*. Journal of Rural Studies 32 (2013) 126e136
- Blangy S dan Mehta H. 2006. *Ecotourism and ecological restoration*. Journal for Nature Conservation 14 233—236
- Berkes F, Colding J, Folke C. 2003. *Navigating socialecological system building resilience for complexity and change*. Cambridge (UK): Cambridge University pr Chambers R dan Conway RG. 1991. *Sustainable rurallivelihoods: practical concepts for the 21st century*. IDS Discussion paper 296
- Che D. 2006. Developing ecotourism in First World, resource-dependent areas. *Geoforum* 37 212–226
- Creswell WJ. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta (ID) : Pustaka Pelajar
- Dahuri R dan Nugroho I. 2012. *Pembangunan Wilayah Perspektif ekonomi sosial dan lingkungan*. Jakarta (ID) : LP3S
- Damanik JP. 2013. *Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
- Dharmawan AH. 2001. *Farm Household Livelihood strategies and Socio-economic Change in Rural Indonesia*. [Disertasi]. Gottingen (DE): the Georg-August University of Gottingen
- Dharmawan AH. 2007. *Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor*. Jurnal Sodality. Vol. 01, No. 02
- Eklom A. 2012. *Livelihood Security, Vulnerability and Resilience: A Historical Analysis of Chibuenene, Southern Mozambique*. *AMBIO* 2012, 41:479–484 editor. *Social Vulnerability and Resilience Dalam Living With Environmental Change Social Vulnerability, Adaptation And Resilience In Vietnam*. 2001. New York (US): Routledge
- Ellis F dan Freeman AH. 2005. *Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies*. New York (US) : Routledge
- Ellis F. 1998. *Peasant Economic: Farm household and agrarian development*. Canbridge (UK): Canbridge University Pr.
- Folke C. 2006. *Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses*. *Global Environmental Change* 16 . 253–267
- Foster J, Lake IR, Watkinson AR, dan Gill JA. 2013. *Marine Dependent Livelihoods and Resilience to Environmental Change: A Case Study of Anguilla*. Marine Policy. Elsevier Ltd.
- Iqbal M. 2004. *Strategi Nafkah Rumah tangga Nelayan (Studi Kasus di Desa Nelayan Tangkap Kabupaten Lamongan Jawa Timur)*. [Tesis]. Bogor (ID): Insitut Pertanian Bogor.
- Juanda B. 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Bogor (ID). IPB Press
- Januarti A. 2013. *Struktur dan Strategi Nafkah Rumah tangga Pedagang Warung di Kawasan Wisata Alam Gunung Salak Endah Bogor*. [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Kelly PM, Tran Viet Lien, Hoang Minh Hien, Nguyen Huu Ninh dan Adger WN. 2001. *Managing environmental change in Vietnam*. Di dalam: Adger WN, Kelly PM, Nguyen Huu Ninh,
- Lambini CK, Nguyen TT. 2014. *A comparative analysis of the effects of institutional property rights on forest livelihoods and forest conditions: Evidence from Ghana and Vietnam*. *Forest Policy and Economics* 38(2014)178–1
- Mardiyansih DI. 2003. *Industri Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal (Kasus Dua Desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah)*. [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Nyaupane GP dan Poudel S. 2011. *Linkages Among Biodiversity, Livelihood, and Tourism*. *Annals of Tourism Research*, Vol. 38, No. 4, pp. 1344–1366, 2011
- Scoones I. 1998. *Sustainable rural livelihoods a framework for analysis*. IDS Working Paper 72. Brighton: IDS.
- Scott JC. 1981. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta (ID). LP3S
- Song W dan Liu M. 2014. *Assessment of decoupling between rural settlement area and rural population in China*. *Land Use Policy* 39 331–341
- Sprezza CI, Wiesmann U, Rist S. 2013. *An Indicator Framework for Assessing livelihood resilience in the context of Social-Ecological Dynamics*: *Global environmental Change*. Elsevier Ltd.
- Tao CHT dan Wall G. 2009. *Tourism as a sustainable livelihood strategy*. *Tourism Management* 30 90–98
- Wardhani AR. 2007. *Kajian Potensi Kawasan Pesisir Bagi Pengembangan Ekowisata Sekotong, Kabupaten Lombok Barat-NTB* [Tesis]. Bogor (ID): Insitut Pertanian Bogor.
- Wianti IN. 2011. *Kapitalisme Lokal Suku Bajo (Studi Kasus Nelayan Bajo Moladan Mantigola, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara)*. [Tesis]. Bogor (ID): Insitut Pertanian Bogor.
- Wilson AG. 2013. *Community resilience, policy corridors and the policy challenge*. *Land Use Policy* 31 298–310.